

BAB IV

HASIL REAKTUALISASI KONSEP WELFARE STATE

MAHATMA GANDHI DI INDIA MASA KINI

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, negara manapun, dan bangsa apapun, termasuk Negara India. Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dianalisa karena sudah membuktikan sedikit demi sedikit bahwasanya Globalisasi yang dianggap mampu untuk menciptakan kesejahteraan di dunia ini, ternyata hanya membuat jurang yang semakin lebar menuju kesejahteraan tersebut. Tidak semua negara siap dengan kedatangan era Globalisasi. Adanya persaingan ketat antar negara, membuat adanya persaingan untuk menjadi negara pemenang, atau hanya menjadi negara yang terjajah oleh si negara pemenang. Satu hal yang dapat dipelajari adalah, bahwasanya Globalisasi harus disaring sedemikian rupa, agar tidak tenggelam di dalam permainannya. Melalui liberalisasi ekonomi dengan skala Internasional atau yang sering kita sebut sebagai Neo-Liberalisme, walaupun berbeda diksi dengan Globalisasi, keduanya hadir dalam wajah yang sama dan menakut-nakuti seluruh rakyat di dunia ini.

India yang juga terkena pengaruh dari Globalisasi ini, mencoba untuk menyiasatinya dengan kaca mata yang sangat hati-hati agar rakyatnya tidak terkena pengaruhnya. Atau setidaknya mampu menahan gelombangnya masuk terlalu dalam dan menghancurkan negara mereka. Selain itu, dunia Internasional,

India juga mencoba untuk mencari sebuah solusi agar negara-negara

berkembang lainnya mampu menahan gelombang Globalisasi dan Neo-Liberalisme melalui berbagai forum Internasional dan kebijakan luar negeri.

A. India Di Pusaran Neo-Liberalisme

Saat ini Globalisasi telah menjadi kata yang sangat familiar dengan semua kalangan masyarakat dunia. Hampir semua kejadian di dunia ini mempunyai hubungan erat dengan Globalisasi. Bahkan dalam pidato-pidato para pejabat, kata Globalisasi pasti ada terselip di dalamnya. Buku-buku pelajaran, gaya hidup, sampai dengan kehidupan bermasyarakat, semuanya hampir bersentuhan langsung dengan yang namanya Globalisasi. Kesepakatan tentang arti sesungguhnya dari Globalisasi ini memang belum pasti. Ada yang mengatakan bahwa Globalisasi adalah pemadatan dunia, serta intensifikasi kesadaran dunia sebagai suatu keseluruhan. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Globalisasi adalah sebuah proses penyatuan secara menyeluruh, ataupun Global. Tapi yang pasti, inti dari semua definisi-definisi tersebut mengandung makna yang sama yaitu, Internasionalisasi, Liberalisasi, Universalisasi, dan Deteritorialisasi.⁵⁵ Internasionalisasi, karena kata "Global" menggambarkan hubungan lintas negara. Liberalisasi, karena di Era ini, integrasi ekonomi diberlakukan untuk menyatukan semua negara. Dari sini juga lahir sistem perdagangan bebas atau *Free Trade*.

Karena untuk menciptakan sebuah kesatuan ekonomi dunia, perdagangan bebas dianggap lebih efisien dibandingkan sistem proteksi. Univesialisasi, artinya, semua orang di dunia ini menikmati dan terkena

⁵⁵ Nanang Pramui Mngasejati dan Ucu Hartanto. *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*.

dampak dari penyebaran barang dan ilmu pengetahuan. Westernisasi, bisa juga dibidang Modernisasi, dimana budaya barat dan Amerika telah menjadi budaya dunia. Deteritorialisasi, diartikan sebagai dimana batas-batas territorial tidak lagi menghalangi manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Demikianlah Globalisasi sebagai sebuah kesatuan yang kompleks dari semua proses yang ada di dunia ini, yang terkadang berjalan secara bertolak belakang dan bahkan terkadang saling bertentangan satu sama lain.

Globalisasi yang selalu dianggap dapat membawa kesejahteraan bagi dunia ternyata belum berdampak kepada sebagian besar masyarakat dunia. Parahnya lagi, Globalisasi malah semakin memperburuk keadaan. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Neo-Liberalisme yang menjadi sistem utama ekonomi dunia di Era Globalisasi ini merupakan salah satu biang keroknya. Para pendukung Neo-Liberalisme menganggap Globalisasi sebagai sebuah ladang basah yang mampu mensejahterakan rakyat dunia.⁵⁶ Mereka berpandangan bahwa pasar bebas akan membuat keuntungan yang sangat luar biasa dan dapat mensejahterakan rakyat dunia. Meski masih memiliki kekurangan, secara radikal keuntungannya lebih banyak dari kerugiannya. Namun pada kenyataannya, justru lebih banyak yang dirugikan ketimbang yang diuntungkan.

Integrasi ekonomi dunia dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan pribadi. Integrasi peraturan ekonomi diwujudkan melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan *World Bank*

memaksa negara-negara berkembang untuk mematuhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Pemudahan investor asing dan *Multi National Cooperation* untuk masuk ke dalam negara berkembang, merupakan bagian dari strategi yang dikeluarkan melalui kebijakan yang dikamufase sedemikian rupa sehingga tidak begitu ketahuan kedok sesungguhnya yang sebenarnya ingin mengeksploitasi. Neo-Liberalisme sesungguhnya sangatlah kejam. Melalui tangan-tangan tak terlihat (*Invisible Hand*), mereka masuk dan mengeruk apa yang dapat dijadikan keuntungan bagi mereka. Bagi India sendiri, pengaruh Neo-Liberalisme sudah terasa semenjak berakhirnya pemerintahan Nehru. Liberalisasi ekonomi mulai dipaksakan secara perlahan namun pasti. Monopoli dan proteksi pemerintah mulai dilonggarkan di beberapa sektor. Bahkan sekarang India sendiri telah menjadi negara yang memakai sistem ekonomi Semi-Liberal.

Mengapa Semi-Liberal, karena meskipun ada beberapa sektor yang diliberalisasikan karena memang adanya tuntutan dunia Internasional yang memang mau tidak mau memaksakan adanya kerjasama dengan pihak luar. India masih memberlakukan sistem proteksi terhadap sektor-sektornya yang dianggap penting. Pemerintah India menganggap bahwasanya, ada beberapa sektor penting yang harus dilindungi seperti misalnya pertanian dan Usaha Kecil Menengah agar tidak ditindas oleh perusahaan-perusahaan asing yang jelas lebih besar dari mereka. Inilah yang menjadi kekuatan India dalam menahan laju Neo-Liberalisme yang begitu kencang berlari menghantam semua yang ada di depannya. India sangat protektif terhadap rakyatnya. India

sangat melindungi petani dan Usaha Kecil Menengah. Pasar India juga masih tergolong susah untuk dimasuki. Selain itu juga, rakyat India lebih suka memakai produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari mulai makanan, pakaian, sampai dengan kendaraan, semuanya rata-rata produk dalam negeri. Boleh dikatakan hal ini didasarkan pada prinsip *Swadeshi* yang dibangun Gandhi sejak dulu. Diperkuat pula oleh sistem ekonomi repelita ala Nehru yang tidak mau mengimpor barang dari luar negeri.

Perpaduan ini menjadi unik karena, pada akhirnya menghasilkan sebuah sistem campuran dimana Liberalisme tidak sepenuhnya diberlakukan di India. Unsur-unsur sosialisme juga masih melekat di India. Ini dibuktikan oleh banyaknya subsidi yang diberikan oleh negara, dan juga proteksi pemerintah di berbagai sektor. Gandhi pernah mengungkapkan tentang sebuah konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dibangun bukan saja dari sisi materialis, tapi juga spiritual dan moral. Mungkin konsep ini lah yang membangun India menjadi negara yang setengah Liberal dan setengah Sosialis.⁵⁷ Budaya yang dipopulerkan Gandhi, seperti non kekerasan, tolong-menolong sesama manusia, kesamaan hak dan kewajiban, anti eksploitasi, dan pemakaian produk sendiri, sudah melekat di dalam diri tiap-tiap Individu di India. Dan kesemuanya inilah yang menjadi fondasi utama India masa kini dalam menghadapi tantangan Era Global dan Neo-Liberalisme. Berikut beberapa pemikiran Mahatma Gandhi yang dijadikan sebagai landasan

berpijak bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan juga landasan bagi masyarakat India dalam menyikapi era Globalisasi dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2

FALSAFAH GANDHI	BENTUK KEBIJAKAN	BENTUK PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
<p><i>Swadeshi</i>, adalah falsafah Gandhi yang merujuk pada kebanggaan memproduksi dan memakai produk dalam negeri</p>	<p>Salah satu kebijakan yang menggunakan <i>Swadeshi</i> adalah kebijakan proteksi terhadap Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu pemikiran Gandhi yang diterapkan dalam bentuk kebijakan. Demi menghindarkan pengusaha kecil dari persaingan tidak sehat dengan pengusaha asing, maka kebijakan ini dilakukan agar pengusaha lokal bisa terus membangun kreativitas tanpa ada pengeksploitasian dari perusahaan asing. Selain itu proteksi diberlakukan di sector penting lain seperti pendidikan, otomotif, pertanian dan farmasi.</p>	<p>Masyarakat India sendiri lebih senang menggunakan produk dalam negeri. Hal ini karena kesederhanaan Gandhi melekat di diri mereka. Kendaraan-kendaraan yang beredar di jalanan India juga buatan sendiri seperti Bajaj dan Ambassador. Pakaian mereka pun juga buatan sendiri, seperti kain khadi yang bahkan menjadikan tekstil India sangat ternama di India. Liberalisasi yang berlaku di sektor pendidikan juga demikian. Orang tua lebih memilih untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah lokal karena menganggap kualitasnya sama saja atau bahkan lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah Internasional.</p>

<p><i>Satyagraha Ahimsa</i>, adalah falsafah turunan <i>Satyagraha</i> Gandhi yang merujuk pada perlawanan yang tidak dengan kekerasan atau <i>Nir-Violence</i></p>	<p>kebijakan-kebijakan yang diambil dari falsafah <i>Ahimsa</i> salah satunya dapat kita lihat dari perlawanan India di dunia Internasional. India memang berteman dekat dengan Amerika Serikat dan beberapa kali dicap sebagai Neolib. Namun dibelakang itu, India justru melakukan perlawanan, salah satunya adalah dengan memperjuangkan hak-hak petani di G-20 dan G-33 serta membuat poros ekonomi baru melawan Eropa-AS bersama China, Brazil, dan Rusia.</p>	<p>Di dalam sebuah negara, demonstrasi adalah hal yang biasa. Namun cara rakyat India untuk menarik perhatian baik pemerintah maupun dunia Internasional tidak melalui cara kekerasan namun terkadang ekstrim. Dalam kasus bibit transgenik Monsanto misalnya, selain melakukan demonstrasi, para petani juga sering melakukan bunuh diri serta penolakan mentah-mentah terhadap Monsanto. Alhasil, pangeran Charles dari Inggris yang terkesima melihat perjuangan itu, mendirikan yayasan Bhumi Vaardan Foundation yang bertujuan untuk membantu petani disana. Selain itu kasus Monsanto juga masih diperjuangkan oleh kaum anti Neo-Liberal di India</p>
<p><i>Satyagraha Sarvodaya</i>, adalah falsafah turunan <i>satyagraha</i> yang merujuk pada kesetaraan dan anti diskriminasi</p>	<p>Kebijakan penghilangan sistem kasta melalui program pemerintah <i>Positive Discrimination</i> yang bertujuan untuk mengkoreksi praktek diskriminasi dimasa lalu dan sekarang melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak untuk memperoleh kesempatan di dalam pekerjaan dan pendidikan. Selain itu kebijakan</p>	<p>Persamaan dan kesetaraan merupakan salah satu tujuan utama Gandhi pada waktu itu untuk diwujudkan di India, sampai-sampai Gandhi meninggal ditembak oleh seorang hindu fanatik yang tidak terima dirinya</p>

	<p>untuk mengurangi diskriminasi terhadap minoritas muslim juga tidak terjadi lagi. Buktinya, dalam beberapa pemilu terakhir, presiden terpilih merupakan seorang muslim, yang terakhir adalah Pradibha Patil.</p>	<p>memperjuangkan hak-hak orang muslim di India. Diskriminasi memang tidak mungkin hilang begitu saja, namun setidaknya kekerasan akibat diskriminasi baik kasta maupun agama di India sudah jauh berkurang dibandingkan dengan masa lalu.</p>
--	--	--

B. Perlawanan Petani Terhadap Monsanto

Gandhi pernah mengampanyekan perlawanan terhadap ketidak-adilan tuan tanah yang pro kolonial terhadap para petani pada masa penjajahan kolonial Inggris. Maka diberlakukanlah reformasi penghibahan tanah radikal. Gagasan Gandhi ini menjadi gerakan penghibahan tanah yang dipimpin oleh AV Bhave, yang mengimbau para tuan tanah agar mau menghibahkan sebagian tanahnya kepada para petani miskin. Sampai tahun 1957 gerakan ini berhasil mengumpulkan 50 juta area tanah untuk dibagikan kepada petani. Gagasan ini juga berkembang menjadi gerakan penghibahan kekayaan dan penghibahan tenaga kerja. Sistem yang memberikan hak kepada para tuan tanah untuk memungut pajak dan memaksakan bagi hasil yang tidak adil, merupakan sisa feodalisme yang merupakan sumber eksploitasi dan harus dihapuskan.

Namun masuknya perusahaan benih Monsanto pada tahun 2002 dengan *Genetical Modified Organism* atau modifikasi organism secara

genetisnya, berkolaborasi dengan perusahaan lokal India, BT Cotton (perusahaan kapas), membuat kekacauan baru di sektor pertanian India terutama kapas. Awal mula berdirinya Monsanto adalah ketika diberlakukannya perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) yang diberlakukan oleh WTO yang mengakibatkan adanya perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari berbagai pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan oleh individu maupun suatu perusahaan dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak keaslian karya cipta yang menyangkut hak cipta, merek, paten, desain produk, dan rahasia dagang.⁵⁸ Dan dari kebijakan tersebut lah Monsanto memonopoli ilmu pengetahuan dan dapat mungkin untuk menguasai sumber daya alam dan teknologi sehingga mereka mampu untuk mengadvokasikan kedaulatan atas produk rekayasa genetika yang mereka buat sehingga merugikan petani di India.

Pemberlakuan hak paten bagi varietas-varietas ini sungguh tidaklah pantas, karena varietas-varietas tersebut telah dibudidayakan oleh petani selama berabad-abad. Hak paten yang dimiliki Monsanto ini, jelas membunuh hak petani di India, mereka dilarang membudidayakan benih yang telah berlabel tanpa ijin. Bila ternyata petani didapati menggunakannya walau tanpa sengaja, maka mereka akan mendapat sanksi dari Monsanto. Akibat daripada kekejaman yang dilakukan oleh Monsanto ini, banyak petani yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Demonstrasi petani di hampir seluruh penjuru

⁵⁸ Parera, V. *WTO dan TRIPs* <http://www.indonesia.com/noskun/2002/10/14/EDISI14/h04>.

India mulai merebak. Bahkan di negara bagian Andhra Pradesh sempat melarang bibit GM Monsanto ini beredar pada tahun 2005, namun tidak berhasil, dan sampai sekarang pemerintah provinsi ini melakukan tuntutan hukum terhadap Monsanto.

Pemerintah yang pada awalnya pro terhadap Monsanto, mulai tidak kuat menahan gempuran dari rakyatnya. Semakin tingginya tingkat bunuh diri petani akibat benih-benih transgenik ini, atau yang sering mereka sebut *GM Genocide*, sering dianggap sebagai pembunuhan massal secara perlahan-lahan oleh para pengamat HAM di dunia.⁵⁹ Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan dan pangan seperti Greenpeace telah menyatakan keikutsertaannya dalam memperjuangkan hak-hak petani India yang telah direbut oleh Monsanto. Melalui slogan-slogan macam "Quit India Now!" Greenpeace bersama aliansi petani dan buruh India menetapkan tanggal 9 agustus sebagai hari dimana perusahaan-perusahaan yang memonopoli pertanian dan pangan seperti Monsanto harus pergi.

Bahkan, akibat banyaknya perlawanan melalui cara bunuh diri, pangeran Charles yang terkesan dan prihatin atas fenomena ini, mendirikan sebuah yayasan bernama *Bhumi Vardaan Foundation* yang mengayomi serta membantu para petani di India.⁶⁰ Petani dan rakyat India tidak akan berhenti melakukan perlawanan yang *Ahimsa*, atau tanpa kekerasan seperti yang selalu dilakukan dan diserukan Gandhi di dalam kehidupannya sehari-hari, dengan

⁵⁹ Isabelle Delforge, *Dusta Industri Pangan: Menelusuri Jejak Monsanto (Nourrir Le Monde Ou L'Agrobusiness)*, Penerbit REaD Book, 2003, hal 167

⁶⁰ http://www.greenpeace.org/india/en/Press/Monsanto_quit_India_day_observed_across

harapan mendapat simpati masyarakat dunia sehingga dapat memaksa pemerintah India untuk mencari jalan mengeluarkan Monsanto dari India.

C. Tarif Murah Untuk Rakyat

Keberpihakan pemerintah India dan negara bagian dapat kita lihat dari tarif-tarif dan subsidi-subsidi yang diberlakukan untuk rakyatnya. Seperti sarana umum, kebutuhan pokok, dan juga pendidikan. Dari sektor pendidikan misalnya. Pendidikan India boleh dikatakan tergolong murah namun berkualitas. Hal ini juga tidak lepas dari perdebatan antara pro liberalisasi dan pro proteksionisme. Beberapa kali terjadi perdebatan antara menteri keuangan dengan menteri pengembangan sumber daya manusia. Menteri keuangan beranggapan bahwa dengan masuknya liberalisasi pendidikan akan menambah pundi-pundi dollar di India serta mencapai pendidikan yang murah karena akan menimbulkan iklim yang kompetitif. Sementara kementerian pengembangan sumber daya manusia beranggapan bahwa, liberalisasi pendidikan hanya akan melunturkan semangat nasionalisme yang saat ini ada pada generasi-generasi di India.⁶¹

Disamping itu, liberalisasi pendidikan hanya merupakan bagian dari strategi WTO untuk lebih membuka pasar di India yang selama ini tergolong sulit untuk ditembus investasi asing. Meskipun saat ini di India telah diberlakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor pendidikan, bukan berarti India tunduk secara terus terang terhadap kebijakan WTO ini. Justru

sebaliknya, institusi dan lembaga pendidikan justru akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitasnya demi menjadi yang terbaik.

Namun anehnya lagi, meskipun Liberalisasi di bidang pendidikan telah diberlakukan, lembaga pendidikan asing di India tidak sepopuler lembaga-lembaga lokalnya. Masyarakat beranggapan bahwa lembaga pendidikan asing memberikan harga yang mahal tapi tidak mempunyai mutu yang setara dengan lembaga lokal di India. Disisi lain, sistem pendidikan sangat baik dan tidak eksklusif. Di India, memanggil seorang Amartya Sen yang memenangi berbagai penghargaan Nobel atau sekelas mantan presiden Abdul Karim untuk mengisi perkuliahan tidak perlu dengan prosedur yang rumit-rumit. Dan mereka memang dengan sukarela datang tanpa dibayar kapanpun mahasiswa membutuhkan mereka. Kesederhanaan dan kerendahan hati yang mereka tunjukkan patut dijadikan panutan oleh tenaga mengajar di negara-negara lain.

Disamping itu juga, harga buku-buku pelajaran dan uang sekolah di India tergolong murah dan tidak sedikit yang disubsidi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa India sangat serius dalam mempersiapkan generasinya kedepan. Dari sektor sarana umum, India juga memberlakukan tarif murah bagi rakyatnya. Contohnya dari sektor transportasi karena menjadi elemen penting di dalam aktivitas masyarakat. Transportasi umum seperti bus dan metro tergolong sangat murah. Untuk sarana umum metro misalnya, hanya dikenakan 6 Rupee sampai 22 Rupee. Harga yang sangat murah untuk ukuran

transportasi umum.⁶² Tujuan dari tarif murah yang diterapkan pada sarana transportasi umum di India adalah untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi. Untuk mengurangi polusi India juga memberlakukan wajib menggunakan Bahan Bakar Gas yang tentunya disubsidi sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan bensin.

D. Kesederhanaan Masyarakat India Tercermin dari Elitnya

Pejabat adalah orang yang dihormati dan disegani. Secara umum, seorang pejabat haruslah berpakaian rapi, memakai dasi, mengenakan aksesoris mewah, serta memakai kendaraan-kendaraan yang super mewah. Tapi kenyataan seperti itu justru terbalik jika melihat pejabat-pejabat tinggi di India. Kesan eksklusif yang selalu terbayang jika melihat seorang yang penting di suatu negara mungkin akan sirna jika melihat pejabat-pejabat di India. Mereka hanya mengenakan kemeja lusuh, dengan celana keper yang kusam dan sepatu buatan negeri sendiri. Kendaraan mereka juga hanya mobil-mobil butut buatan India Ambassador.

Perkantoran di India juga tidak semewah kantor-kantor pemerintahan di negara-negara lainnya. Gedung-gedungnya hanyalah gedung-gedung tua peninggalan Inggris. Isi gedung-gedung tersebut juga tidak mewah. Penampilan bersahaja seperti ini memang sudah menjadi ciri khas orang India yang lebih suka dan nyaman dengan gaya hidup sederhana. Di India para eksekutif ini hanya berharap dapat hidup dari gaji saja.

⁶² *Ibid.* Hal 91-93

Jikapun ada korupsi, hanya sedikit. Boleh dibilang masyarakat India tidak terkena efek pamer Internasional. Mereka lebih memilih untuk memakai produk dalam negeri. Kesederhanaan para eksekutif dan pejabat India itu juga tercermin dari belanja pegawai mereka yang murah. Bayangkan, gaji presiden hanya tak sampai 2 kali lipat pendapatan per-kapita penduduknya. Saat ini presiden India menerima sekitar US\$ 3.000 per tahun (setara dengan Rp.29.700.000).⁶³ Begitu juga dengan perdana menteri yang hanya menerima gaji setara dengan 2 kali lipat pendapatan per-kapita India, yaitu sekitar US\$ 4.106 per tahun (setara dengan Rp.37.300.000). Jumlah gaji pemimpin negara ini merupakan gaji presiden/perdana menteri termurah di dunia.⁶⁴

Sementara itu gaji pegawai parlemen tahun 2010 hanya berkisar 16.000 Rupee (setara dengan Rp.3.000.000), dan sekarang naik menjadi 50.000 (kira-kira setara dengan Rp.10.000.000). Sangat murah dibandingkan dengan gaji anggota parlemen negara-negara lain. Begitu juga dengan belanja pegawai negeri dan swasta mereka sangat murah.

Lagi-lagi hal ini membuktikan dedikasi mereka terhadap negara sangatlah besar. Masalah gaji tidak begitu diperdulikan oleh para pegawai-pegawai di India. Karena kesederhanaan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat India.

⁶³ Gaji parlemen, diakses tanggal 6 Mei 2011, dari <http://www.blurtit.com/q299540.html>
diakses tanggal 16 mei 2011

⁶⁴ Gaji Perdana Menteri India diakses tanggal 7 April 2011
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/23/160126-gaji-sby-30-kali->

E. Kemajuan Industri Otomotif Berkat Kebijakan Proteksi

India, selain maju karena pengembangan ilmu IT dan Farmasi, juga karena semakin kompetitifnya industry otomotif. Industri otomotif bisa dibidang sedang mengalami fase bangkit. Di India sendiri warga lebih memilih untuk memakai kendaraan buatan India seperti mobil Ambassador yang banyak lalu lalang di perkotaan India seperti New Delhi dan Mumbai. Mobil-mobil ini juga dipakai kebanyakan pejabat. Selain itu, untuk angkutan umum juga dipakai kendaraan produk dalam negeri yaitu bajaj yang juga sering disebut rickshaw. Keduanya ini merupakan tonggak awal perkembangan industri otomotif India.

Pada dasarnya, Liberalisasi hampir saja menenggelamkan produk-produk dalam negeri otomotif India. Mobil-mobil Jepang dan Korea seperti Suzuki dan Hyundai kini memiliki saham yang besar di India. Namun lagi-lagi, berkat kerja keras dan kemauan memakai produk dalam negeri, industri otomotif lokal tak mau kalah dan segera berbenah. Hasilnya, industri otomotif seperti Tata Motors, Bajaj Auto dan Mahindra, tetap memegang kendali industri otomotif di India mengalahkan pesaing sekelas Toyota, Honda, Suzuki, Hyundai dan bahkan Ford dari Amerika.⁶⁵ Hal ini terutama didorong oleh kemampuan mereka mendesain serta merekayasa produk mereka sendiri. Selain itu, kualitas yang dipertunjukkan oleh industri otomotif India di dunia Internasional tidak kalah hebat dengan para pesaingnya seperti Jepang atau Cina terutama dalam hal sepeda motor. Jepang yang selama ini menjadi

eksportir terbesar sepeda motor di negara-negara kawasan Asia terutama, mendapat tantangan berat dari India. India mulai memasok sepeda motor mereka ke negara-negara berkembang di Asia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding sepeda motor milik Jepang namun dengan kualitas yang sama. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat negara berkembang dan pengguna sepeda motor yang kebanyakan kalangan menengah kebawah. Sekali lagi ini menunjukkan India tidak profit oriented dan tidak mengambil keuntungan secara membabi buta dari penjualan sepeda motor mereka.

Namun di balik itu semua, keberhasilan industri otomotif India tidak bisa lepas dari perkembangan industri komponennya⁶⁶. Dan kemajuan industri komponen ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan proteksi yang saat itu diberlakukan pemerintah India. Salah satu kebijakan tersebut adalah, ketentuan yang mensyaratkan pihak asing untuk mencapai level 70 persen kandungan lokal selama 3 tahun, serta kewajiban pihak asing dalam memberikan pelatihan kepada mitra lokal di India. Kebijakan ini juga didorong oleh tenaga kerja yang murah dan terampil. Dan di India masa kini, industri komponen telah mampu untuk menyediakan berbagai kebutuhan komponen otomotif bagi pabrikan dalam negeri dan juga bahkan untuk ekspor. Dan disamping itu, dari semua perusahaan itu, ada sekitar 420

perusahaan besar yang menjadi perusahaan kunci, serta didukung oleh sekitar 10.000 perusahaan kecil yang juga mempunyai peran penting di industri ini.⁶⁷

F. Kemajuan Pendidikan India

Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan utama dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Masuknya Liberalisasi di berbagai bidang, juga membuat sektor pendidikan India merasakan dampaknya. Namun, liberalisasi tidak serta-merta diberikan keleluasaan begitu saja dalam memanipulasi di sektor ini. Beberapa kali terjadi perdebatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia tentang Liberalisasi pendidikan melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Menurut Kementerian Keuangan, dengan masuknya FDI di sektor pendidikan, akan membuat institusi pendidikan asing datang dan memberikan persaingan kualitas yang kompetitif dengan harga yang murah.

Memang pada tahun 2001, India telah memberlakukan FDI 100 persen. Namun regulasi pemerintah yang protektif, tetap menghasilkan respons yang tidak baik terhadap modal asing. Hal ini juga ditegaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Sumber Daya manusia. Bagaimanapun juga, masuknya Liberalisasi pendidikan hanyalah akal-akalan WTO untuk meraup keuntungan di India. Disisi lain, masyarakat India kurang tertarik dengan

lembaga-lembaga asing ini. Masyarakat menganggap bahwa mutu institusi dan lembaga asing justru lebih rendah dibandingkan institusi-institusi lokal.⁶⁸ Jadi pemberlakuan proteksi dan regulasi ketat tetap dibutuhkan. Disamping perdebatan itu, India memang dikenal dengan pendidikannya yang murah dan bermutu.

Dari segi sarana dan fisik, bangunan-bangunannya memang tergolong tua dan kurang layak pakai. Sekolah Dasar, sampai dengan tingkat Universitas hanya memakai fasilitas sederhana yang mungkin tidak layak untuk belajar. Namun jangan tanya soal mutunya, lulusan-lulusan India banyak dipakai sebagai pakar, tenaga ahli, dan tenaga ajar di luar negeri.

Prinsip kesederhanaan yang bersahaja nampaknya masih dipegang teguh oleh kalangan siswa dan mahasiswa. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan soal fasilitas dan kemewahan sarana belajar. Bagi mereka, menghasilkan lulusan berkualitas jauh lebih penting ketimbang meributkan soal fasilitas pendukung. Namun India, dengan kesederhaannya mampu mencetak lulusan-lulusan berkualitas. Di kampus University New Delhi dan Jamia Millia Islamia misalnya, bangunan-bangunan tua digunakan untuk menuntut ilmu, ruang belajarnya hanya berukuran kira-kira 5x6 meter yang hanya dilengkapi dengan kursi-kursi kayu, meja belajar, papan tulis dengan kapur tulis-jangan bayangkan white board berspidol, serta satu unit kipas angin.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hal 179

⁶⁹ Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)* Rineka

India juga berjuang untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi yaitu 39 persen dari lebih 1.2 Milliar penduduk. Salah satunya melalui perpustakaan buta huruf yaitu Perpustakaan Kerala. Kerala adalah Negara Bagian India yang masih tergolong miskin, namun dengan tingkat melek huruf tertinggi sejak 2001 yaitu 91 persen. Sebelum kemerdekaan, kegiatan untuk memberantas buta huruf sudah berlangsung di Negara Bagian ini.

Semua ini bermula dari perpustakaan desa yang dicanangkan oleh partai komunis India tahun (*Communist Party of India-Marxist*) 1945. Mereka menamakan gerakan ini sebagai *Grandhashala Sangham* atau pergerakan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat buta huruf yang tinggi di pedesaan melalui program kursus membaca dua bulan di perpustakaan di desa-desa yang telah dimulai sejak tahun 1955.

Selain itu, perpustakaan juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas sastra, drama, sosial dan politik. Saat ini sudah ada sekitar 100 perpustakaan per-Kabupaten di Negara Bagian Kerala.⁷⁰ Fasilitasnya meliputi radio, televisi, pusat studi akademik, dan beberapa bagian khusus seperti, perpustakaan anak, perpustakaan keliling, informasi, perempuan, dan olahraga. Sementara perpustakaan terbesarnya State Central Library, memiliki koleksi 310.000 buku, 120 langganan majalah, 56 jurnal berbahasa Inggris 56 jurnal berbahasa Malayalam 11 jurnal untuk anak dan

G. Perlawanan Negara Berkembang di WTO

Globalisasi yang selalu digembar-gemborkan dan dianggap mampu membawa kesejahteraan pada rakyat dunia, ternyata membuat ketimpangan antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya demonstrasi yang menentang berbagai pertemuan yang mencanangkan agenda Neo-Liberal di dalamnya.

“Battle of Seattle” yang menjadi gerakan pertama menentang Globalisasi dan Neo-Liberalnya menjadi icon pergerakan dalam mengakomodasi kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.⁷¹ Kala itu, gerakan “Battle of Seattle” menentang pertemuan para menteri keuangan di forum World Trade Organization (WTO). Setelah “Battle of Seattle”, masih banyak lagi gerakan yang lebih terorganisir menentang pertemuan-pertemuan yang membahas tentang ekonomi internasional. Semua pergerakan itu hanya sedikit dari banyak kelompok yang merasa dirugikan oleh Globalisasi dengan ekonomi Neo-Liberalnya.

Namun perlawanan tidak hanya terjadi dari luar forum-forum tersebut. India bersama dengan sejumlah negara berkembang lainnya juga melancarkan protes keras terhadap kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Di forum WTO misalnya, India adalah negara yang paling vokal dalam menyerukan keadilan. Latar belakangnya jelas. Di India, 58 persen penduduknya adalah petani yang menyumbangkan 22 persen

⁷¹ Bello, Walden., *De-Globalisasi (Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru)*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004, hal 2

Produksi Domestik Bruto (PDB).⁷² Selain itu, sebagian besar ekonomi India masih didominasi sektor manufaktur yang tentunya membutuhkan pasar ekspor ke negara-negara maju. Kebijakan WTO mengalihkan pasar ke negara-negara berkembang untuk investasi produk negara maju, justru membuat ketimpangan.

Pembukaan pasar negara berkembang terhadap investasi negara maju hanya akan menguntungkan negara maju. Disisi lain mereka akan mengeksploitasi dan menjajah ekonomi negara-negara berkembang. Hal ini menjadi keprihatinan India. India menganggap bahwasanya, kebijakan perdagangan internasional bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat global. Peningkatan standard hidup, jaminan pendapatan, pertumbuhan yang baik, serta kesempatan yang sama antara negara berkembang dengan negara maju, seharusnya merupakan tujuan utama dari perdagangan internasional. India juga memperjuangkan petaninya di WTO. Perlindungan terhadap petani adalah tugas yang mulia bagi India. India menganggap negara-negara maju terlalu memproteksi pertanian mereka. Padahal negara maju sendiri selalu saja masuk ke sektor pertanian negara berkembang dan mengeksploitasinya.

Menteri Perdagangan dan Industri Inda Kamal Nath mengatakan bahwasanya proteksi pertanian negara maju telah menghambat negara berkembang untuk mengekspor ke negara maju. Hal ini diserukan di WTO agar terjadi keseimbangan dan juga untuk kepentingan pertanian yang menjadi

andalan kehidupan petani di negara berkembang secara umum dan di terutama di India. Untuk itulah India harus peka terhadap perkembangan eksternal agar mampu mengontrol dan memperjuangkan petaninya. India juga membentuk aliansi negara berkembang melalui forum G-20 dan G-33 untuk membela